

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk intervensi tokoh *blater* terhadap program kebijakan Kepala Desa Paseseh diantaranya, berperan dalam mengisi jajaran distruktur desa, politik jangka panjang, *fee*, memudahkan akses terhadap keponakan. *Pertama*, berperan dalam mengisi jajaran distruktur desa; Dengan merekomendasikan orang terdekat tokoh *blater* untuk menjadi perangkat desa sehingga bisa terlibat dalam mengambil keputusan.

Kedua, politik jangka panjang; untuk memperkuat status sosial, seorang tokoh *blater* pertama yang harus dilakukan adalah menguasai desa atau kepala desa memperkuat posisinya sebagai *blater* karena ini menyangkut untuk kepentingan-kepentingan politik kedepan. Misalnya kepentingan politik pemilihan Bupati, Gubernur, DPR dan lain sebagainya. Dengan status sosial yang dimiliki tokoh *blater* bisa menjadi semacam broker untuk suksesi pemilihan tersebut.

Ketiga fee (hadiah, bonus), pola dengan berbentuk *fee* yang diberikan kepala desa kepada tokoh *blater* sebagai balas jasa atas kemenangan waktu pemilihan atau sebagai uang keamanan agar tidak diganggu oleh orang lain. *Keempat* memudahkan akses terhadap keponakan; pola selanjutnya tokoh *blater* dalam hal ini H Mansur memudahkan akses terhadap keponakan untuk mengerjakan proyek jalan raya desa yang ada diwilayah kekuasaannya seperti beberapa jalan raya di Desa Paseseh.

2. Bentuk Keterlibatan *Blater* Pada Pemilihan Kepala Desa Paseseh

Selanjutnya, mengenai Latar belakang adanya intervensi tokoh *blater* terhadap kepala tentu tidak bisa lepas dari peran yang dilakukan dari sebelum pemilihan hingga kepala desa menjalani pemerintahan desa. Salah satunya di Desa Paseseh pada tahun 2010 dimana kepala desa terpilih banyak dibantu oleh tokoh *blater* yang bernama H Mansur.

Tokoh *blater* H Mansur ikut langsung dalam waktu pemilihan kepala desa saat itu, misalnya ikut Menggalang massa, menjaga *blater* luar tidak boleh masuk/ikut campur dipemilihan kepala desa di desa tersebut. dan waktu pemungutan suara, H Mansur menjaga keamanan surat suara. Kalau tidak jaga dikhawatirkan terjadi kecurangan oleh *blater* yang lain.

Pada dasarnya *blater* merujuk pada sosok orang kuat di desa yang bisa memberikan “perlindungan”keselamaan secara fisik terhadap masyarakat. *Blater* juga merupakan kelompok sosial yang cukup berpengaruh dikalangan masyarakat Madura. Sehingga tidaklah mengherankan jika Kaum *blater* masih dominan diposisi sebagai elite pedesaan, akan tetapi belum begitu eksis dan tampil dominan sebagai elite perkotaan. Dipedesaan, komunitas *blater* masih memainkan peran sebagai broker keamanan dalam interaksi ekonomi dan sosial politik. Selain itu, tak sedikit yang bermain di dua kaki, selain sebagai broker keamanan juga sebagai tokoh formal, yakni menjadi *state apparatus* dengan cara menjadi *klebun* (kepala desa). Dibanyak tempat dipedesaan Madura, tak

Kepala Desa Paseseh, diantaranya; berperan dalam mengisi jajaran distruktur desa, politik jangka panjang, *fee*, memudahkan akses terhadap keponakan. *Pertama*, berperan dalam mengisi jajaran distruktur desa; Dengan merekomendasikan orang terdekat tokoh *blater* untuk menjadi perangkat desa sehingga bisa terlibat dalam mengambil keputusan.

Kedua, politik jangka panjang; untuk memperkuat status sosial, seorang tokoh *blater* pertama yang harus dilakukan adalah menguasai desa atau kepala desa memperkuat posisinya sebagai *blater* karena ini menyangkut untuk kepentingan-kepentingan politik kedepan. Misalnya kepentingan politik pemilihan bupati, gubernur, DPR dan lain sebagainya. Dengan status sosial yang dimiliki tokoh *blater* bisa menjadi semacam broker untuk suksesi pemilihan tersebut.

Ketiga fee (hadiah, bonus), pola dengan berbentuk *fee* yang diberikan kepala desa kepada tokoh *blater* sebagai balas jasa atas kemenangan waktu pemilihan atau sebagai uang keamanan agar tidak diganggu oleh orang lain. *Keempat* memudahkan akses terhadap keponakan; pola selanjutnya tokoh *blater* dalam hal ini H Mansur memudahkan akses terhadap keponakan untuk mengerjakan proyek jalan raya desa yang ada diwilayah kekuasaannya seperti beberapa jalan raya di Desa Paseseh

2. Dampak intervensi tokoh *Blater* terhadap kebijakan Kepala Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Intervensi tokoh *blater* tentu menimbulkan dampak terhadap jalannya pemerintahan tingkat desa, baik dampak positif maupun negatif. Sehingga intervensi tokoh *blater* tersebut secara tidak langsung bisa diukur kaitannya dalam program pembangunan. Dalam teori intervensi politik, intervensi *blater* terhadap pemerintahan desa dapat digolongkan kepada tingkatan intervensi *grassroot* yang dimana pelaku perubahannya melakukan intervensi terhadap sekelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Halden adanya intervensi *blater* terhadap kepala desa disebabkan oleh masih kuatnya primordialisme politik, dimana ikatan kekerabatan, politik balas budi, dan mencari rasa aman masih sangat kuat dalam pemerintah ditingkat desa.

Penelitian ini menemukan bahwa intervensi *blater* mempunyai dampak positif, diantaranya dampak keamanan desa dan kontrol terhadap kebijakan kepala. *Pertama*, keamanan desa, Agar terhindar dari kekacauan yang tidak diinginkan, peran dari *blater* akan disegani oleh dari pencurian dan lain sebagainya karena orang segan melihat siapa tokoh di desa yang mendampingi kepala desa tersebut. *Kedua*, adanya kontrol terhadap kebijakan kepala sehingga kebijakan yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan tepat. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti memberikan pelatihan industri kecil seperti membantuk, kelompok tani dan lain sebagainya. Selain itu, ketika mendapat bantuan dari pemerintah diawasi, agar betul-betul bantuan tersebut untuk kepentingan desa.

Di dalam program desa diharuskan mengacu pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang prioritas program desa dibagi menjadi dua yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, intervensi positif dari tokoh *blater* adalah memastikan pembangunan desa bisa benar-benar bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat serta kemajuan desa.

Intervensi positif dari tokoh *blater* terhadap kepala desa adalah memastikan lingkungan desa yang aman, dari peran *blater* yang disegani oleh masyarakat. Sehingga kepala desa bisa dengan mudah menjalankan pemerintahan desa yang kondusif. Selain itu, dampak positif dari tokoh *blater* memastikan program yang dibutuhkan oleh masyarakat desa bisa benar-benar direalisasikan oleh kepala, apabila tidak dilaksanakan. Maka tokoh *blater* bisa menjadi pihak yang mengontrol atas kinerja kepala sebagai representasi masyarakat desa.

Sedangkan temuan penelitian tentang dampak negatif dari intervensi tokoh *blater* terhadap kepala desa yakni adanya tumpang tindih kebijakan dan keberpihakan kepentingan. *Pertama*, tumpang tindih kebijakan; karena dimungkinkan kepala desa dan tokoh *blater* berbeda pendapat dalam cara berfikir dan membuat kebijakan. Maka dari itu, kalau kepala desanya tidak punya pendirian bisa saja disetir oleh tokoh *blater*, tapi kalau kepala desanya bisa mandiri, dan punya pendirian, maka tidak ada masalah atas peran *blater*.

Kedua, keberpihakan kepentingan. Dampak negatif dari intervensi tokoh *blater* terhadap kebijakan kepala desa adalah apabila tokoh *blater* memihak pada salah satu orang yang mempunyai kepentingan. Maka seringkali menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi, apabila *blater* ketika ada permasalahan bisa memposisikan diri diposisi yang netral ini akan membantu sekali.

Dampak negatif dari intervensi tokoh *blater* terhadap kepala desa di atas menimbulkan adanya tumpang tindih kebijakan dan keberpihakan kepentingan. Tradisi tersebut merupakan tradisi lama yang mungkin akan banyak mengalami perubahan kedepan. Hal yang negatif adalah ketergantungan terhadap seorang tokoh *blater*, dalam realitasnya terkadang keberpihakan terhadap salah satu orang yang berkepentingan. Ini yang cenderung pada gesekan terhadap masyarakat. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan bukan saja untuk mewujudkan kesejahteraan materil, tetapi juga lebih penting adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Membangun mental masyarakat merupakan masalah yang memerlukan pemikiran dan waktu. Hal ini menyangkut perubahan-perubahan pola pikir, sikap terhadap nilai, norma-norma maupun perubahan orientasi masa lampau ke masa nyata dan rasional dalam melaksanakan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau mencari sasaran pembangunan. Artinya, yang perlu dipertahankan adalah nilai-nilai lokal yang terbukti berhasil dan bertahan mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat desa tersebut. Padahal menurut

